BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini, penulis memaparkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian berdasarkan keterkaitan terhadap variabel dependen maupun variabel independen. Tinjauan pustaka yang disusun bersifat deduktif yaitu penyusunan teori maupun konsep-konsep yang bersifat umum dilanjutkan pada konsep-konsep yang bersifat khusus.

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Bidang-bidang yang mencakup hubungan internasional meliputi keseluruhan interaksi politik, ekonomi, budaya dan interaksi lainnya antara aktor negara maupun non negara (Viotti & Kauppi, 1999: 483). Untuk dapat memahami aktifitas dan fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional, maka dikembangkan studi Hubungan Internasional yang memiliki tujuan dasar mempelajari perilaku

internasional, yaitu perilaku aktor-aktor internasional baik aktor negara maupun non negara; dalam interaksi internasional yang meliputi perilaku perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi serta koalisi maupun interaksi yang terjadi dalam suatu wadah organisasi internasional (Mas'oed, 1989: 31-32).

Studi Hubungan Internasional menurut McClelland dalam Perwita & Yani merupakan suatu studi tentang interaksi antar jenis-jenis kekuatan sosial tertentu dimana di dalamnya terdapat studi tentang keadaan-keadaan yang relevan yang mengelilingi interaksi tersebut. Interaksi yang dilakukan oleh aktor-aktor hubungan internasional dilandasi oleh adanya sumber daya yang melekat pada tiap-tiap aktor tersebut (2005: 4).

Hubungan internasional berkembang bersamaan dengan seiring perkembangan zaman yang semakin maju dengan berbagai macam teknologi yang diciptakan menyebabkan studi hubungan internasional menjadi semakin kompleks. Kompleksitas hubungan internasional itu sesuai dengan pendapat Jack C. Plano yang mengatakan bahwa hubungan internasional mencakup hubungan antar negara atau sebagai interaksi para aktor yang tindakan serta kondisinya dapat menimbulkan konsekuensi terhadap aktor lainnya untuk memberikan tanggapan (1999: 115).

2.2 Politik Internasional

Politik internasional merupakan salah satu kajian pokok (*core subject*) dalam Hubungan Internasional yang mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*). Menurut Holsti,

dalam Perwita & Yani, studi politik internasional adalah studi mengenai pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon negara lain (2005: 40). Politik internasional dapat dipahami sebagai bagian dari hubungan internasional, walau terminologi hubungan internasional, politik dunia, politik internasional sering digunakan secara sinonim (Viotti & Kauppi, 1999: 483).

Politik internasional merupakan salah satu wujud dari interaksi dalam hubungan internasional yang membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit, yaitu dengan berfokus pada diplomasi dan hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya Adapun objek yang menjadi kajian politik internasional juga merupakan kajian politik luar negeri, dimana keduanya menitikberatkan pada penjelasan mengenai kepentingan, tindakan serta unsur *power*. Dalam politik internasional pelakunya hanyalah negara, inilah yang membedakan antara politik internasional dengan hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005: 40).

Terdapat suatu penggambaran tiga arena politik internasional, yaitu: *global, region*, dan *nation-state* yang memberikan dasar struktrur analitis untuk pertimbangan politik internasional. Di dalam politik internasional, sebuah sistem merupakan keseluruhan hubungan yang berlangsung diantara unit-unit yang mempunyai kuasa di dalam arena khusus, ada tiga arena yang mewakili tiga sistem tersebut, yaitu:

1. Sistem dominan (*the dominant system*) yang berada di arena global, merupakan konfrontasi yang paling kuat dari negara-negara.

2. Sistem subordinate (*the subordinate system*) yang berada di suatu *region*, merupakan keseluruhan interaksi hubungan-hubungan diantara *region* tersebut.
3. Sistem internal (*the internal system*) yang berada di suatu negara (bangsa), merupakan keseluruhan hubungan-hubungan organisasi yang tersusun di dalam suatu politik domestik (Cantori & Spiegel, 1970: 2-3).

2.3 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional (Perwita & Yani, 2005: 47). Sedangkan politik luar negeri menurut Suffri Yusuf, S.H dalam buku *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri* merupakan iringan kebijaksanaan disertai rentetan tindakan yang rumit tetapi dinamis, yang ditempuh oleh negara itu dalam hubungannya dengan negara-negara lain atau sebagai kegiatannya dalam organisasi-organisasi regional dan internasional (1989: 113).

Politik luar negeri terdiri dari dua elemen, yaitu tujuan nasional yang akan dicapai dan alat-alat untuk mencapainya. Interaksi antara tujuan nasional dengan sumber-sumber untuk mencapainya merupakan subjek kenegaraan yang abadi (Crabb Jr. dalam Couloumbis & Wolfe, 1999: 126). Adapun keputusan-keputusan dalam politik luar negeri terdiri dari tiga kategori utama, yaitu:

1. Keputusan yang bersifat pragmatis (terencana) adalah keputusan besar yang mempunyai konsekuensi jangka panjang; membuat studi lanjutan, pertimbangan dan evaluasi yang mendalam mengenai seluruh opsi alternatif.
2. Keputusan yang bersifat krisis adalah keputusan yang dibuat selama masa-masa terancam berat; waktu untuk menanggapinya terbatas; dan ada elemen yang mengejutkan yang membutuhkan respon yang telah direncanakan sebelumnya.
3. Keputusan yang bersifat taktis adalah keputusan penting biasanya bersifat pragmatis; memerlukan revaluasi, revisi dan pembalikan (Couloumbis & Wolfe, 1999: 129).

Keputusan-keputusan dalam politik luar negeri dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu penilaian masalah, perhitungan biaya atau risiko, aspek domestik: konsensus, informasi kurang lengkap, tekanan waktu, gaya nasional, komitmen dan hal yang mendahului.

1. Penilaian masalah

   Suatu unsur yang amat penting dalam analisis masalah adalah pemilihan awal sasaran yang ingin dicapai. Ini merupakan inti dari strategi yang berupa suatu rencana penggunaan sumber-sumber untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dalam tingkat politik luar negeri, rencana semacam itu disebut strategi nasional.

2. Perhitungan biaya atau risiko

   Perhitungan biaya atau risiko merupakan faktor yang mempengaruhi suatu keputusan politik luar negeri, karena tidak ada negara yang dapat melakukan

politik luar negeri bisa terbebas dari hal ini yaitu pembatasan jumlah sasaran, dan terbatasnya jumlah pilihan alternatif yang tersedia.

3. Aspek domestik: konsensus

   Semua negara tanpa memandang bentuk pemerintahan dan falsafah politiknya terikat oleh konsensus rakyat dan dibatasi oleh sikap masyarakat.

4. Informasi kurang lengkap

   Dalam politik luar negeri, informasi yang kurang lengkap antara lain disebabkan oleh kelambanan pembuat keputusan dalam mengejar peristiwa yang cepat berubah sebelum fakta-fakta yang ada lengkap terkumpul. Karena itu informasi seadanya akan dijadikan dasar untuk mengurangi resiko seminimal mungkin. Informasi tidak lengkap mempunyai dua arti yaitu kekurangan data atau terlalu banyak data. Kurangnya data disebabkan lambatnya informasi dan bila tidak dapat menunggu, maka pembuat keputusan akan mengisinya dengan *estimate* atau perkiraan. Bilamana terlalu banyak data, maka informasi yang diperlukan terkubur dalam tumpukan data dan memerlukan waktu unuk menemukannya sedangkan waktu mendesak untuk mengambil keputusan.

5. Tekanan waktu

   Berbagai peristiwa terjadi dengan cepat dan hasil-hasilnya jauh lebih cepat diketahui, sehingga banyak para pembuat keputusan politik luar negeri menghadapi masalah waktu yang diperlukan untuk dapat berpikir tepat dan akan kehilangan mutu pemahaman dan keluwesan yang diperlukan dalam mengambil keputusan.

6. Gaya nasional

   Gaya nasional merupakan tradisi dan citra masyarakat yang mengharap para pejabatnya melaksanakan dan mengambil keputusan secara khusus sesuai dengan kehendaknya. Gaya nasional adalah hal yang penting dalam proses pembentukan pola analisis dari pembuat keputusan itu sendiri.

7. Komitmen dan hal yang mendahului

   Faktor terakhir yang mempengaruhi keputusan adalah struktur dari komitmen dan peristiwa yang mendahului sebelum keputusan dibuat. Dengan cara yang berbeda, semua negara atau aparatur pembuat keputusan dan individu-individu pembuat keputusan pasti terikat oleh masa lampaunya yang lama ataupun yang baru berlalu (Nasution, 1991: 21-24).

Di dalam politik luar negeri terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi pembuatan politik luar negeri. Rosenau mengelompokkan variabel-variabel yang ada dalam politik luar negeri ke dalam lima kategori, yaitu:

1. Variabel Ideosinkretik (variabel individual)

   Variabel ini berkaitan dengan persepsi, *image* dan karakteristik pribadi *decision maker*, antara lain: ketenangan vs tergesagesaan, kemarahan vs prudensi, pragmatism vs ideologi yang bersifat pembasmian atau pemberantasan (*crusadism*), keunggulan vs keterbelakangan, kreativitas vs penghancuran, ketakutan vs sikap percaya diri yang berlebihan, dan lain-lain.

2. Variabel Peranan

   Variabel peranan ini biasanya didefinisikan sebagai gambaran pekerjaan atau sebagai aturan-aturan perilaku yang diharapkan bagi presiden, menteri-menteri kabinet, birokrat (pejabat) tingkat tinggi, wakil-wakil di kongres dan para senator, wartawan para pendidik, persatuan para buruh, dan para pemimpin kelompok penekan lainnya serta elit-elit lain yang mempengaruhi, merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan.

3. Variabel Birokratis

   Variabel ini menyangkut struktur dan proses pemerintahan serta efeknya terhadap politik luar negeri. Variabel-variabel birokratis ini meliputi struktur organisasi pemerintah, standar prosedur pelaksanaan perwakilan-perwakilan birokratis yang besar, proses pembuatan keputusan pada berbagai peringkat perumusan kebijaksanaan, berbagai teknik implementasi keputusan-keputusan politik, dan sikap para pejabat menyangkut dampak politik luar negeri terhadap politik domestik dan kesejahteraan umum negara.

4. Variabel Nasional

   Yang termasuk ke dalam variabel-variabel nasional ini meliputi variabel lingkungan (*environmental variables*) seperti luas, lokasi geografis, tipe daerah, iklim dan sumber-sumber alam negara. Selain itu, GNP, hasil pertanian dan industri, tingkat pertumbuhan ekonomi, kekuatan militer dan atribut-atribut lain dari kapabilitas *power* suatu negara juga termasuk ke dalam kategori variabel nasional.

5. Variabel Sistemik

Variabel sistemik meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan negara lain yang bisa merangsang respons politik suatu negara (1980: 95-150).

Adapun dalam kaitannya dengan penelitian ini, variabel ideosinkretik (variabel individual) akan dibahas lebih lanjut mengingat ideosinkretik seorang pemimpin sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara yang dipimpinnya. Adapun yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini adalah mengenai kepemimpinan seorang presiden Iran yakni Mahmoud Ahmadinejad yang ideosinkretiknya sangat mempengaruhi kebijakan luar negerinya terkait respon Iran terhadap propaganda *Holocaust* Zionisme Israel. Sebagaimana kita ketahui bahwa semenjak pasca Revolusi Islam Iran tahun 1979, politik luar negeri Iran semakin lebih mendasarkan politik luar negerinya pada prinsip-prinsip Islami dan cenderung menentang hegemoni Barat serta anti Israel. Dimana hal tersebut selalu dipegang teguh oleh para pemimpin Iran hingga saat ini yakni saat Iran berada di bawah kepemimpinan Ahmadinejad.

Politik luar negeri Iran memiliki beberapa prinsip dan tujuan yang dijadikan landasan untuk melakukan suatu reaksi terhadap kejadian-kejadian eksternal. Jika kejadian tersebut bertentangan dengan politik luar negerinya, maka Iran akan membuat suatu langkah sebagai respon terhadap kejadian tersebut. Dan dalam kaitannnya dengan penelitian ini, Iran merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Zionisme Israel menyangkut penjajahan atas rakyat Palestina bertentangan dengan politik luar negerinya yang tidak menghendaki adanya suatu bentuk penindasan

ataupun dominasi terhadap seluruh umat Muslim di dunia, yang kemudian diimplementasikan melalui kebijakan luar negerinya.

2.3.1 Kebijakan Luar Negeri

Pada dasarnya kebijakan luar negeri merujuk pada fenomena proses dimana negara-negara berupaya memenuhi kepentingan nasionalnya dalam masyarakat global. Kebijakan luar negeri muncul sebagai suatu fenomena sosial karena setiap negara tidak dapat memenuhi sendiri seluruh kebutuhan-kebutuhan sosial, politik, dan ekonominya bila hanya mengandalkan sumber daya yang terdapat di dalam teritorialnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah suatu negara pada umumnya akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tersebut di luar batas-batas wilayah teritorialnya atau dalam berhubungan dengan negara-negara lainnya pada arena internasional (Amstutz, 1995: 146).

Tindakan-tindakan eksternal negara tertuang dalam kebijakan luar negerinya meliputi berbagai macam jenis dan bentuk. Oleh karena itu, oleh beberapa ilmuwan, jenis dan bentuk tindakan eksternal suatiu negara dikonsepsikan ke dalam beberapa kategorisasi. Rossenau dalam Perwita dan Yani mengkonsepsikan kebijakan luar negeri ke dalam tiga konsepsi, dimana satu sama lain saling terkait, yaitu:

1. Kebijakan luar negeri dalam pengertian seperangkat orientasi (*a cluster of orientation*), yaitu berisikan seperangkat nilai-nilai ideal kebijakan luar negeri suatu negara yang menjadi panduan pelaksanaan kebijakan luar negeri negara

yang bersangkutan. Orientasi ini merupakan hasil dari pengalaman sejarah dan persepsi masyarakat terhadap letak strategis negaranya dalam politik dunia.

2. Kebijakan luar negeri dalam pengertian strategi atau rencana atau komitmen untuk bertindak (*as a set of commitment and plans for action*), yang berisikan cara-cara dan sarana-sarana yang dianggap mampu menjawab hambatan dan tantangan dari lingkungan eksternalnya. Strategi suatu negara ini didasari dari orientasi kebijakan luar negerinya, sebagai hasil interpretasi elit terhadap orientasi kebijakan luar negerinya dalam menghadapi berbagai situasi spesifik yang membutuhkan suatu strategi untuk menghadapi situasi tersebut.
3. Kebijakan luar negeri dalam pengertian bentuk perilaku (*as a form of behavior*), merupakan fase paling empiris dalam kebijakan luar negeri. Konsep ketiga ini merupakan langkah-langkah nyata yang diambil para pembuat keputusan dalam merespon kejadian dan situasi eksternal yang merupakan translasi dari orientasi dan artilukasi dari sasaran dan komitmen tertentu. Perilaku ini berbentuk baik tindakan-tindakan yang dilakukan maupun pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pemerintah. Perilaku kebijakan luar negeri merupakan implementasi strategi kebijakan luar negeri suatu negara dalam situasi tertentu (2005: 53-55).

Tindakan-tindakan kebijakan luar negeri pada hakekatnya merupakan teknik-teknik yang digunakan sebagai sarana pencapaian tujuan kaebijakan luar negeri yang ditetapkan dalam strategi kebijakan luar negeri. Tindakan kebijakan luar negeri ini

dapat dibedakan berdasarkan teknik yang digunakannya. Menurut Holsti, tindakan kebijakan luar negeri dapat dibedakan menurut sarana yang digunakannya, yaitu:

1. Diplomasi, merupakan upaya pemerintah untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan nasionalnya, rasionalisasi kepentingan tersebut, ancaman, janji, dan kemungkinan kesepakatan-kesepakatan yang dapat diterima dalam suatu isu kepada pemerintah negara lain. Diplomasi pada hakikatnya merupaka proses negosiasi dimana masing-masing pemerintah melakukan tawar-menawar dalam suatu isu tertentu demi mencapai kepentingan nasionalnya secara optimal melalui saluran-saluran resmi yang telah disepakati (Holsti, 1990: 130).
2. Propaganda, merupakan upaya-upaya pemerintah suatu negara untuk mempengaruhi perilaku dan opini publik asing atau negara lain sehingga sesuai dengan dengan yang diharapkan oleh pemerintah negara yang melakukan propaganda. Pemerintah berupaya mempengaruhi opini publik asing atau negara lain, dan atau kelompok etnik, religi, dan kelompok ekonomi tertentu dengan harapan bahwa publik ini pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku dan kebijakan pemerintahnya sesuai dengan harapan pemerintah negara yang melancarkan propaganda (Holsti, 1990: 151).
3. Ekonomi, merupakan upaya-upaya pemerintah untuk memanipulasi transaksi ekonomi internasional demi mencapai tujuan-tujuan nasionalnya. Bentuk manipulasi ini dapat berupa imbalan (*rewards*) maupun paksaan (*coercion*). Sebagai suatu sarana pemaksa, maka transaksi ekonomi internasional digunakan

untuk memaksa pemerintah asing mengubah kebijakan-kebijakannya, baik domestik maupun luar negeri agar sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah yang melancarkan ancaman tersebut. Sedangkan sebagai sarana imbalan, maka transaksi ekonomi internasional digunakan untuk mendukung agar pemerintah asing melakukan atau terus tindakan-tindakan yang diinginkan pemerintah yang melancarkab imbalan (Holsti, 1990: 167).

4. Militer, merupakan upaya-upaya pemerintah suatu negara untuk mempengaruhi perilaku dan kebijakan negara lain dengan menggunakan ancaman dan atau dukungan militer (Holsti, 1990: 192).

2.3.2 Respon

Dalam Kamus Politik, respon didefinisikan sebagai tanggapan, reaksi, jawaban (2005: 470). Di dalam interaksi antarnegara terdapat hubungan pengaruh dan respons. Pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran tetapi dapat juga merupakan limpahan dari suatu tindakan tertentu. Sedangkan respon merupakan suatu bentuk sikap yang dilakukan oleh negara yang terkena atau menjadi sasaran pengaruh dalam hubungannya dengan negara lain untuk mempengaruhi atau memaksa pemerintah negara lainnya agar menerima keinginan politiknya (Perwita & Yani, 2005: 41).

2.4 Interaksi Internasional

Interaksi internasional merupakan keseluruhan proses komunikasi dan pertukaran yang berkaitan dengan aspek-aspek politis antara aktor-aktor di dalam

sistem internasional, dimana di dalam proses tersebut akan terlihat tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan perilaku dari aktor-aktor tersebut yang akan dipengaruhi oleh konteks dan tingkatan (level) dimana proses tersebut muncul dan bekerja.

Bentuk-bentuk interaksi dapat dibedakan berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan interaksi, intensitas interaksi serta pola interaksi yang terbentuk. Secara umum bentuk interaksi dari suatu negara terhadap negara lain dapat berupa akomodasi (*accommodate*), mengabaikan (*ignore*), berpura-pura seolah-olah informasi atau pesan dari negara lain belum diterima (*pretend*), mengulur-ulur waktu (*procastinate*), menawar (*bargain*), dan menolak (*resist*) aksi dari negara lain (Perwita & Yani, 2005: 42).

2.5 Konflik

Sifat hakiki dari kepentingan dan sasaran-sasaran yang tercakup dalam kebijakan nasional setiap negara cenderung menimbulkan konflik. Jika sasaran terbatas yang jelas dapat dicapai, maka sasaran mutlak cenderung melibatkan negara-negara dalam konflik, karena tindakan negara sudah tidak lagi mengenal batas-batas dan tidak lagi memperhatikan rasio atau kepentingan serta sasaran yang mereka perjuangkan.

Menurut Ramsbotham & Woodhouse dalam bukunya *Resolusi Damai Konflik Kontemporer* merumuskan konflik sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang saling bertentangan dan memiliki tujuan yang tidak sejalan, terutama yang menyangkut aspek-aspek perubahan sosial. Yang menjadi akar permasalahan

kemudian adalah bagaimana seseorang atau kelompok mengelola konflik dengan mengidentifikasi sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang mampu bertahan lama di dalam kelompok-kelompok yang bertikai (1999: 58-61).

Dalam garis besarnya yang menjadi sasaran konflik terbagi menjadi dua kategori, yaitu: konflik dengan sasaran keseimbangan dan konflik dengan sasaran hegemoni. Konflik dengan sasaran keseimbangan (*balancing objective conflict*) bertujuan untuk mencapai keadaan seimbang mengenai suatu masalah yang dipertentangkan. Sedangkan konflik dengan sasaran hegemoni (*hegemonic objective conflict*) bertujuan untuk mendominasi (Nasution, 1991: 54).

2.6 Komunikasi Internasional

Komunikasi Internasional adalah komunikasi yang ruang lingkupnya melintasi batas-batas wilayah negara dan menyangkut interaksi atau hubungan cukup luas dan intens dengan bangsa lain (Rudi, 2005: 125). Kegiatan (proses) komunikasi internasional berisi pesan atau informasi tentang berbagai kondisi dan perkembangan di negara yang bersangkutan beserta masyarakatnya untuk diketahui secara luas oleh masyarakat negara lain. Oleh karena itu, komunikasi internasional merupakan bagian penting dalam hubungan internasional dan merupakan suatu teknik dari pelaksanaan kebijakan luar negeri masing-masing negara.

Adapun fungsi komunikasi internasional antara lain:

1. Mendinamisasikan hubungan internasional yang terjalin antara dua negara atau lebih serta hubungan di berbagai bidang antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda negara atau berbeda kebangsaan (kewarganegaraan).
2. Membantu atau menunjang upaya-upaya pencapaian tujuan hubungan internasional dengan meningkatkan kerjasama internasional serta menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman baik antara pemerintah dengan pemerintah (*government to government*) maupun antara penduduk dengan penduduk (*people to people*).
3. Merupakan teknik untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri bagi masing-masing negara atau untuk memperjuangkan pencapaian kepentingan-kepentingannya di negara lain (Rudi, 2005: 126).

Komunikasi internasional dapat dipelajari dari tiga perspektif (sudut pandang atau pendekatan), yaitu:

1. Perspektif Diplomatik

   Perspektif Diplomatik lebih banyak dipergunakan untuk meningkatkan komitmen kerjasama, memperluas pengaruh, dan menanggulangi atau mengatasi perbedaan pendapat, salah paham, salah pengertian, sampai menghindari pertentangan atau konflik dalam masalah tujuan dan kepentingan setiap negara.

2. Perspektif Jurnalistik

   Dalam perspektif jurnalistik, komunikasi internasional dilakukan melalui saluran media massa cetak dan elektronik. Arus informasi yang bebas dan

terbuka dari negara-negara maju yang datang melalui media tersebut saat ini dinilai lebih merugikan negara-negara berkembang, karena komunikasi semacam ini dijadikan oleh negara-negara maju sebagai alat kontrol terhadap kekuatan sosial yang dikendalikan oleh kekuatan politik dalam percaturan politik internasional. Komunikasi internasional melalui jalur jurnalstik ini bahkan sering dipergunakan untuk tujuan-tujuan propaganda dengan tujuan akhir untuk mengubah kebijakan dan kepentingan suatu negara atau memperlemah posisi negara lawan.

3. Perspektif Propagandistik

Kegiatan komunikasi internasional dalam perspektif propagandistik lebih ditujukan untuk menanamkan gagasan ke dalam benak masyarakat negara lain dan dipacu demikian kuat agar mempengaruhi pemikiran, perasaan serta tindakan. Tujuan ini mencakup perolehan dan penguatan atau perluasan dukungan rakyat dan negara sahabat, mempertajam atau mengubah sikap dan cara pandang terhadap suatu gagasan atau suatu peristiwa atau kebijakan luar negeri tertentu (Malik, 1993: v-vii).

2.6.1 Propaganda

Dalam sejarahnya, propaganda adalah mengembangkan dan memekarkan agama Katholik Roma baik di Italia maupun negara-negara lain. Sejalan dengan tingkat perkembangan manusia, propaganda tidak hanya digunakan dalam bidang

keagamaan saja tetapi juga dalam bidang pembangunan, politik, komersial, pendidikan dan lain-lain (Nurudin, 2001: 9).

Propaganda menurut *Kamus Politik* adalah informasi terpilih, benar atau salah, yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu keyakinan, sikap atau arah tindakan tertentu (2003: 370). Sedangkan propaganda menurut Nurudin dalam bukunya *Komunikasi Propaganda* adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok tertentu untuk proses mempengaruhi pihak lain dengan tidak mengindahkan etika, moral, aturan, nilai, norma dan lain-lain guna memenangkan tujuan yang akan dicapai. Akibatnya, apapun akan dilakukan untuk memenangkan tujuan yang akan dicapai tersebut (2001: 16).

Dalam propaganda terdapat beberapa komponen yang perlu dicermati lebih lanjut, diantaranya yaitu:

1. Dalam propaganda selalu ada pihak yang dengan sengaja melakukan proses penyebaran pesan untuk mengubah sikap dan perilaku sasaran propaganda. Dalam propaganda yang melakukan kegiatan ini sering disebut sebagai propagandis. Propagandis bisa berupa individu, individu yang dilembagakan (*the institutionalized person*) atau lembaga itu sendiri. Orang yang dilembagakan yang dimaksud adalah setiap kegiatannya selalu dikaitkan atau atas nama lembaga.
2. Propaganda dilakukan secara terus menerus (*continue*). Hal ini perlu dibedakan dengan kampanye. Propaganda dilakukan secara terus-menerus sejauh kepentingan dari propagandis, sedangkan kampanye dilakukan secara temporer

meskipun dalam kampanye bisa jadi digunakan teknik atau cara propaganda pula.

3. Ada proses penyampaian ide, gagasan, kepercayaan, atau bahkan doktrin. Proses penyampaian pesan ini melibatkan cara tertentu contohnya dengan sugesti, agitasi atau rumor. Oleh karena itu, propaganda bagi pemahaman orang tertentu harus tertanam sifat objektivitas dan kejujuran, namun bagi yang lain kebohongan, manipulasi juga dibenarkan.
4. Mempunyai tujuan mengubah pendapat, sikap dan perilaku individu atau kelompok lain. Tujuan ini sedemikian pentingnya, sehingga ada sindiran bahwa apapun akan dilakukan propagandis untuk mewujudkan tujuannya tersebut. Ini pula yang sering dituduhkan orang secara sinis pada propaganda yang melibatkan "menghalalkan segala cara" (tanpa mengindahkan nilai benar tidaknya) untuk mencapai tujuan.
5. Propaganda adalah usaha sadar. Dengan demikian, propaganda sebuah cara sistematis, prosedural dan perencanaan matang. Perencanaan matang ini juga meliputi siapa yang menjadi sasaran, caranya bagaimana, lewat media apa.
6. Sebagai sebuah program yang mempunyai tujuan konkrit, maka propaganda akan mencapai sasarannya secara efektif jika menggunakan media yang tepat. Media yang biasanya sangat efektif digunakan adalah media massa, meskipun ada media lain seperti komunikasi lisan, buku dan juga film (Nurudin, 2001: 10-11).

Pada perkembangan selanjutnya, propaganda sebagai sebuah cara berkomunikasi yang sangat efektif mengalami perkembangan arti. Propaganda kemudian diartikan secara serampangan sehingga mereduksi artinya, sehingga propaganda sering diidentikkan dengan keburukan, teror, hal yang menyeramkan, pembohongan, usaha mau benar sendiri, memanipulasi dan atribut jelek lainnya. Adapun dalam kaitannya dengan penelitian ini, yang akan diangkat adalah mengenai propaganda yang dilakukan oleh Zionisme Israel terkait dengan tujuannya mendirikan negara Israel di Palestina, memperoleh keuntungan secara ekonomi serta untuk memperoleh dukungan serta simpati internasional.

Terdapat beberapa contoh media yang biasanya digunakan dalam kegiatan propaganda, antara lain:

1. Media massa

   Media massa yang dimaksud dalam hal ini adalah media elektronik dan media cetak. Salah satu keunggulan media ini adalah jangkauannya yang luas. Peran media massa dalam propaganda bisa dikatakan sangat efektif.

2. Buku

   Buku menjadi sangat efektif karena sangat mempengaruhi pemikiran seseorang. Dan pemikiran akan mempengaruhi sikap dan perilaku. Dalam beberapa kasus, buku diciptakan tak luput dari cara propaganda. Artinya seseorang yang menulis buku saat itu tengah mempropagandakan idea tau gagasannya.

3. Film

   Film juga bisa dijadikan media propaganda. Propaganda melalui film kadang membenarkan (dengan mempengaruhi persepsi publik) tindakan yang salah dan inilah yang biasanya menjadi persoalan.

4. Selebaran

   Selebaran ini biasanya digunakan oleh kelompok tertentu yang ada dalam masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan publik pemerintahnya. Selebaran menjadi salah satu media penyalur opini publik untuk dipropagandakan (Nurudin, 2001: 35-37).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, akan dipaparkan lebih lanjut lagi mengenai media-media yang digunakan oleh Zionisme Israel dalam menyebarkan propagandanya mengenai *Holocaust*, sehingga terbentuk opini publik bahwa orang-orang Yahudi merupakan korban yang paling menderita dengan jumlah korban hingga enam juta jiwa yang dibunuh secara sistematis akibat kebencian Nazi Jerman terhadap orang-orang Yahudi. Mereka menggunakan media seperti buku-buku yang menceritakan kisah-kisah penderitaan mereka saat *Holocaust*, banyaknya film-film yang bertemakan *Holocaust* yang menggambarkan kekejaman Nazi Jerman terhadap Yahudi. Selain itu juga, banyak dibangun monumen-monumen *Holocaust* untuk mengenang peristiwa kelam tersebut.

Hubungan opini publik dan propaganda sangat erat sekali dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena suatu propaganda dilakukan untuk mempengaruhi atau mengontrol opini pihak yang menjadi sasaran propaganda. Opini publik dapat

dikatakan sebagai perantara perubahan sikap dan perilaku sasaran propagandis atau sebagai alat yang baik untuk mewujudkan tujuan propaganda. Adapun yang dimaksud dengan opini publik dalam penelitian ini adalah pandangan orang-orang Barat terhadap *Holocaust.* Dimana pada kenyataanya seperti yang telah disinggung pada Bab 1 mengenai adanya dukungan penuh dari Barat seperti Amerika dan Eropa terhadap Zionisme Israel. Sehingga dapat terlihat bahwa propaganda yang dilakukan oleh Zionisme Israel telah berhasil membentuk opini publik internasional.